

**FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH (BAPPEDA) DI KABUPATEN BARRU**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian
dalam rangka memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Negara
Universitas 45 Makassar**

Oleh :

ANDI ABDUL RAKHIM

45 96 021 031

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 45 MAKASSAR**

2003

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari ini, Jum'at Tanggal 14 bulan Maret tahun dua ribu tiga, Skripsi dengan Judul :
"Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di Kabupaten
Barro" oleh:

Nama : **Andi Abdul Rakhim**
NOMOR STB/NIRM : 45 96 021 031
JURUSAN : Ilmu Administrasi
PROGRAM STUDI : Ilmu Administrasi Negara
FAKULTAS : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara pada jurusan Ilmu Administrasi Program Sarjana (S1)

PENGAWAS UMUM


Ir. Darwis Panguriseng, MSc
Rektor Universitas "45" Makassar


Drs. Syamsuddin Maldun
Dekan Fisipol "45" Makassar

PANITIA UJIAN


Drs. Syamsuddin Maldun
Ketua

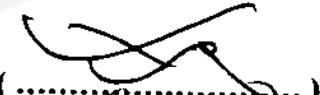

Drs. Marten D. Palobo, M.Si
Sekretaris

TIM PENGUJI

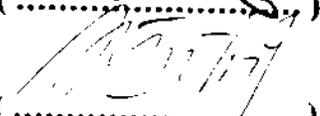
1. **Drs. Rusdi Maidin, M.Si**


(.....)

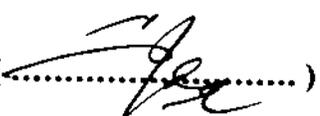
2. **Drs. Syamsuddin Maldun**


(.....)

3. **Drs. Marten D. Palobo, M.Si**


(.....)

4. **Udin B. Sore, S.Ip. M.Si**


(.....)

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar,
tersebut di bawah ini :

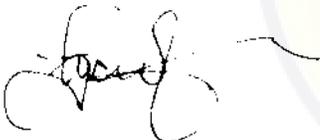
Nama : Andi Abdul Rahim
Nomor Stb : 45 96 021 031
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) di Kabupaten Barru

Disetujui untuk mengikuti "Ujian Skripsi" dalam rangka menyelesaikan studi
guna memperoleh gelar Sarjana Negara dalam jurusan Ilmu Administrasi , Program
Studi Ilmu Administrasi Negara setelah memenuhi segala persyaratan akademik yang
telah ditentukan.

Pembimbing I,

Menyetujui :

Pembimbing II,



Drs. H. Baharuddin, M.Si



Dra. Juharni, M.Si

Mengetahui :

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS "45"
U.b. Pembantu Dekan I,

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi



Ishaq Rahman, S.Ip



Drs. Marten D. Palobo, M.Si

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiq-Nya kepada penulis, hingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul : "Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di Kabupaten Barru", yang sekalipun disana sini masih memerlukan koreksi demi perbaikan seperlunya.

Selesainya penulisan skripsi ini banyak mendapatkan kesulitan, baik kesulitan yang melekat pada diri penuls maupun keterbatasan data dan dana, namun hal itu sedikit demi sedikit dapat ditanggulangi atas bantuan dan kebaikan yang penulis terima dari berbagai pihak terutamna sekali bimbingan dari Bapak Drs. H. Baharuddin, Msi, dan Ibu Dra. Hj. Juhami, Msi, masing-masing sebagai konsultan, sehingga pada kesempatan yang sangat terbatas ini, dari hati yang dalam mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya semoga amal dan baktimu diterima oleh Allah SWT.

Terima kasih juga kepada Bapak Ketua BAPPEDA Kabupaten Barru dan seluruh stafnya yang begitu serius mengurus dan memberikan informasi kepada penulis sehingga penelitian ini berjalan dengan baik.

Sembah sujudku kepada kedua orang tuaku yang setia dan ikhlas tanpa pamrih, rela mengorbankan kepentingan demi keberhasilan dan kesuksesan anaknya yang tercinta. Dari sanubariku yang paling dalam memohon kepadamu agar mereka

diberikan Rahmat sebagaimana ketika penulis masih kecil senantiasa dirawat dengan baik. Amin ... Amin ... Amin.

Kepada teman-temanku semua mulai dari penelitian hingga karya ilmiah ini selesai, banyak memberikan motivasi dan pikiran-pikiran yang konstruktif, semuanya itu penulis tak begitu saja melupakan.

Akhirnya, semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat kepada kemaslahatan umat manusia utamanya yang berminat pada bidang perencanaan dan tentunya sapaan dan kritik, penulis harapkan kepada semua pembaca.

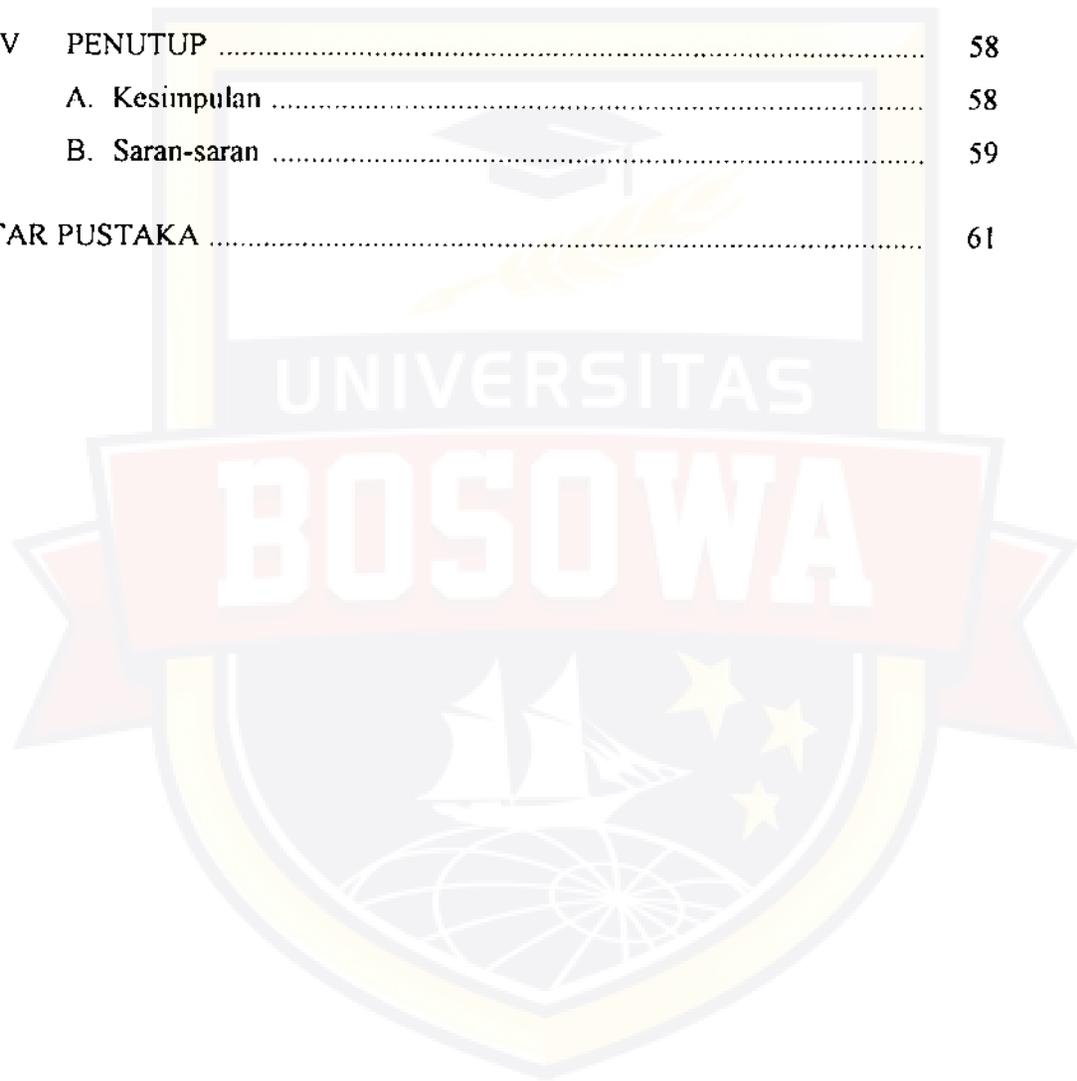
Makassar, Maret 2003

BOSOWA
Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENERIMAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
D. Kerangka Konseptual	4
E. Metodologi Penelitian	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Beberapa Pengertian	11
B. Pentingnya Perencanaan dan Pembangunan	16
C. Perencanaan Pembangunan Sebagai Prinsip Pemerataan Pembangunan	19
BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN BARRU	25
A. Keadaan Umum Kabupaten Barru	25
B. Gambaran Umum BAPPEDA Kabupaten Barru	27
C. Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Barru	30

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A.	Pelaksanaan Fungsi BAPPEDA Kabupaten Barru	34
B.	Fungsi dalam Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	43
C.	Fungsi Memonitoring Pembangunan Daerah	53
BAB V	PENUTUP	58
A.	Kesimpulan	58
B.	Saran-saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Nama Tabel	Halaman
01	Keadaan Penduduk Kabupaten Barru Tahun 2003	26
02	Keadaan Pegawai Kantor BAPPEDA Kabupaten Barru tahun 2003	31
03	Keadaan Pendidikan Formal Pegawai Kantor BAPPEDA Kabupaten Barru Tahun 2003	32
04	Keterangan Responden Mengenai Koordinasi Perencanaan pada Diskusi Pembangunan Tingkat Desa Kabupaten Barru	46
05	Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan Kabupaten Barru Tahun 2003	49
06	Keterangan Responden Mengenai Pelaksanaan Fungsi BAPPEDA dalam Rakorbang Kabupaten Barru Tahun 2003	52
07	Keterangan Responden Mengenai Pelaksanaan Fungsi Monitoring Program/Proyek oleh BAPPEDA Kabupaten Barru Tahun 2003	53
08	Tanggapan Responden Mengenai Fungsi Monitoring dan Pengawasan Rencana Pembangunan BAPPEDA Kabupaten Barru Tahun 2003	56

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang sementara dilaksanakan di Negara Republik Indonesia adalah suatu hal yang mutlak mendapat perhatian dan dukungan partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat, karena pelaksanaan suatu pembangunan adalah merupakan tanggung jawab seluruh warga negara.

Pembangunan yang dilaksanakan desawa ini adalah bertitik tolak pada Landasan Pembangunan Nasional sesuai tercantum dalam Tap MPR Nomor II/MPR/1988 tentang GBHN yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. lebih lanjut dijelaskan dalam GBHN bahwa pada hakekatnya Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembagunan seluruh masyarakat pada umumnya.

Adapun tujuan Pembangunan Nasional telah ditetapkan dalam GBHN (1988 : 101), berbunyi :

“Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedudukan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, dinamis serta lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.”

Dalam upaya menuju tercapainya cita-cita Nasional sebagai badan perencana, BAPPEDA sangat berperan dalam keberhasilan di bidang pembangunan suatu daerah, oleh karena itu Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten atau Kota dalam mempersiapkan rencana program pembangunan di daerah wajib senantiasa memelihara hubungan kerja koordinatif dengan instansi-instansi yang terkait di tingkat propinsi dan di tingkat pusat secara hirarchis.

Hal itu dimaksudkan agar keseluruhan program pembangunan tersebut diharapkan akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada rakyat di daerah yang bersangkutan, sebagai disebutkan dalam GBHN 1988 sebagai berikut

“Bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan bagi pembangunan pribadi warga negara.”

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis bermaksud mengangkat suatu hasil penelitian dengan judul **“FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DI KABUPATEN BARRU”**.

Adapun fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Barru adalah :

1. Menyusun pola dasar pembangunan daerah
2. Menyusun rencana program-program tahunan
3. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah
4. Melaksanakan koordinasi perencanaan instansi vertikal dan dinas daerah lainnya.
5. Memonitoring pelaksanaan pembangunan.

6. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan dengan petunjuk Bupati Kepada Daerah.
7. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi BAPPEDA Kabupaten Barru dalam menyusun program-program tahunan pembangunan?
2. Bagaimana fungsi koordinasi BAPPEDA di Kabupaten Barru?
3. Bagaimana fungsi monitoring BAPPEDA Kabupaten Barru dalam pembangunan daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui fungsi BAPPEDA Kabupaten Barru dalam menyusun program-program tahunan pembangunan.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi koordinasi BAPPEDA Kabupaten Barru dalam pembangunan daerah.
- c. Untuk mengetahui fungsi monitoring oleh BAPPEDA Kabupaten Barru dalam pelaksanaan pembangunan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini berguna memberikan gambaran secara umum bahwa BAPPEDA menjadi salah satu penentu keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Barru, sekaligus bagaimana melaksanakan fungsinya sebagai badan perencana pembangunan, dan memberikan masukan mengenai perencanaan pembangunan yang baik.
- b. Dijadikan sebagai salah satu perbandingan antara teori-teori perencanaan yang baik dengan praktek perencanaan yang dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Barru, sehingga dapat menjadi bahan analisa bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pola pikir yang luas, sekaligus sebagai penerapan hasil pendidikan yang selama ini di peroleh di Universitas "45" Makassar.

D. Kerangka Konseptual

Sebagaimana yang termasuk dalam Bab I Pasal I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, bahwa yang dimaksud dengan Daerah Otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu dan berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan untuk mengantisipasi berbagai ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, maka dikeluarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten.

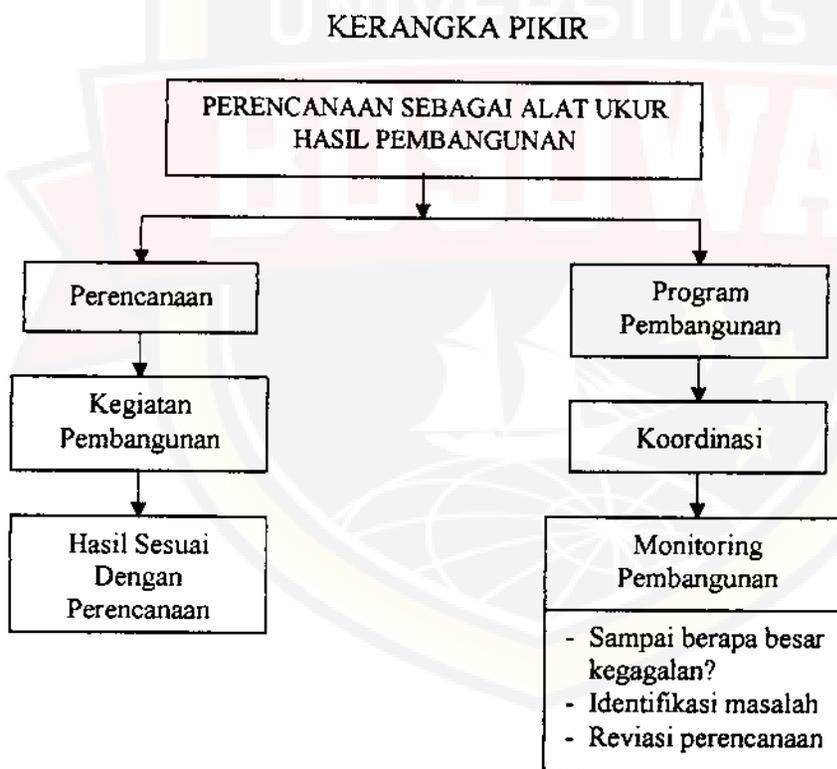
Sesuai dengan surat keputusan tersebut di atas, maka diharapkan keberadaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat berfungsi melakukan koordinasi di antara dinas-dinas satuan organisasi lain dan memonitoring pembangunan dalam lingkungan pemerintah daerah, instansi-instansi vertikal, kecamatan-kecamatan dan badan-badan lain yang berada dalam wilayah daerah untuk mendapatkan input guna menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijaksanaan perencanaan pembangunan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Widjojo Nitisastro :

“Perencanaan ini pada dasarnya berkisar pada dua hal yang pertama ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan, dan yang kedua ialah penilaian diantara cara-cara alternatif yang efisien dan regional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut” (1986 : 14).

Perencanaan tersebut merupakan hasil pilihan dari berbagai alternatif untuk dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat, sehingga pembangunan di bidang sektoral maupun di bidang regional dapat tercapai secara seimbang.

Cara lain dalam penyusunan program/proyek yang lebih efektif yaitu dengan perencanaan sistem rolling plan, yakni suatu cara perencanaan dimana setiap akhir tahun atau periode tertentu, pelaksanaan rencananya disesuaikan atau disusun kembali dengan sasaran, program dan proyek-proyek rencana untuk pelaksanaan tahun berikutnya. Kegiatan ini merupakan suatu proses yang berlanjut terus-menerus, sejalan dengan lajunya pembangunan nasional.

Dari uraian tersebut dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



E. Metodologi Penelitian

1. Tipe dan Dasar Penelitian

a. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan memberi gambaran mengenai kinerja BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan dan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.

b. Dasar penelitian yang digunakan adalah survey yang dimaksudkan untuk mengetahui kinerja BAPPEDA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barru.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (pengamatan) yaitu mengamati secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti untuk memperoleh data dan bahan keterangan dalam menyusun skripsi ini.

b. Wawancara (Interview) yaitu wawancara dilakukan secara langsung tatap muka dan bersifat terbuka terhadap responden, baik secara formal maupun informal.

c. Angket yaitu untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian secara terperinci dan akurat dari responden dengan mengedarkan daftar pertanyaan berdasarkan permasalahan penelitian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai kantor BAPPEDA Kabupaten Barru yang berjumlah 18 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bahagian dari populasi yang akan diteliti. Karena jumlah populasi yang akan diteliti hanya 18 orang, maka semuanya dijadikan sampel atau dilakukan dengan sampling jenu. Kemudian dari instansi lain sebanyak 14 orang responden, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 32 orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Pegawai BAPPEDA

1. Ketua BAPPEDA	:	1 orang
2. Sekretaris BAPPEDA	:	1 orang
3. Kepala Bidang	:	3 orang
4. Kepala Urusan dan Seksi	:	1 orang
5. Staf/Pegawai BAPPEDA	:	<u>12 orang</u>
Jumlah	:	18 orang

b. Pihak Terkait

1. Kepala Desa	:	1 orang
2. Ketua LMD	:	1 orang
3. Tokoh Masyarakat	:	4 orang
4. Tokoh Agama	:	1 orang

5. Dinas Kesehatan	: 3 orang
6. Dinas Pertanian	: 4 orang
Jumlah	: <u>14 orang</u>

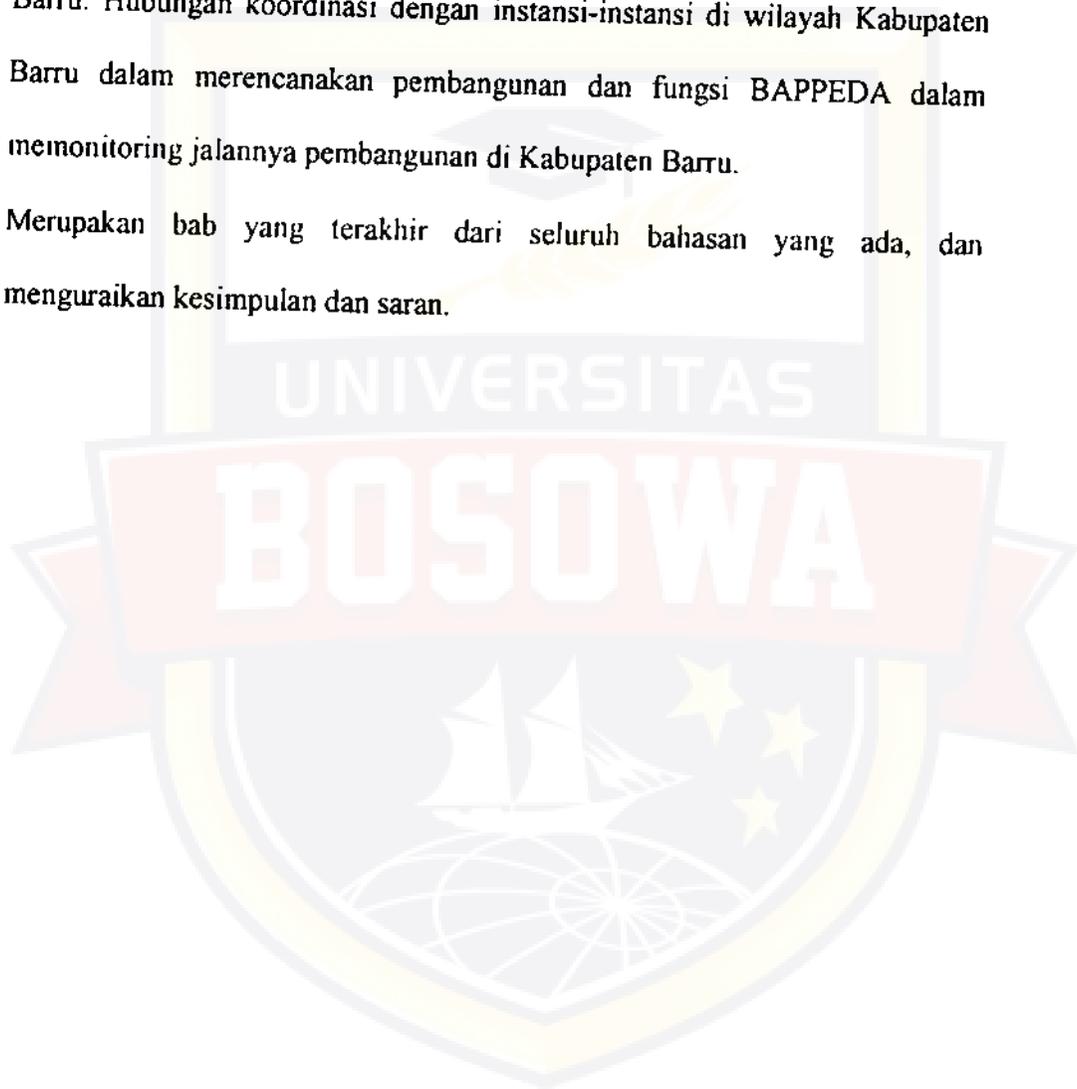
Jumlah keseluruhan : 32 orang

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri atas 5 (lima) alinea yang mempunyai sub bab dan satu dengan yang lainnya merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan sebagai berikut :

- Pendahuluan mencakup antara lain, latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- Tinjauan pustaka meliputi berbagai konsep yang erat kaitannya dengan judul dari karya ilmiah ini dan tentunya ditujukan bagi kesatuan pandangan mengenai permasalahan yang akan dibahas yakni beberapa pengertian, antara lain pengertian fungsi, BAPPEDA, perencanaan, pembangunan, dan pentingnya perencanaan dalam pembangunan, serta perencanaan pembangunan sebagai prinsip pemerataan pembangunan.
- Di dalam gambaran umum lokasi ini penulis menguraikan keadaan umum Kabupaten Barru, gambaran umum BAPPEDA Kabupaten Barru, struktur organisasi BAPPEDA Kabupaten Barru.

- Dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan analisa berupa sistem mekanisme kerja BAPPEDA Kabupaten Barru dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga/badan koordinasi perencanaan pembangunan di Kabupaten Barru. Hubungan koordinasi dengan instansi-instansi di wilayah Kabupaten Barru dalam merencanakan pembangunan dan fungsi BAPPEDA dalam memonitoring jalannya pembangunan di Kabupaten Barru.
- Merupakan bab yang terakhir dari seluruh bahasan yang ada, dan menguraikan kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Beberapa Pengertian

1. Pengertian Fungsi

Berhasil tidaknya pembangunan pada umumnya tergantung kepada beberapa faktor seperti tenaga terlatih, biaya, informasi, peralatan, partisipasi dan kewenangan yang sah. Kendatipun dari beberapa faktor tersebut, maka faktor pemerintah-lah yang sangat penting. Karena pemerintah yang berperan menggali, menggerakkan dan mengkombinasikan faktor-faktor tersebut, yaitu merencanakan dan melaksanakan.

Yang dimaksud dengan peranan (role) dalam tulisan ini ialah aspek dinamis suatu lembaga seperti yang dikatakan Drs. Moh. Isom Sunahudi (1971 : 553) mengatakan :

“Peranan adalah merupakan suatu fungsi dan tugas yang diharapkan dari seseorang atau suatu organisasi dalam suatu pekerjaan yang merupakan tugas tanggung jawabnya dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.”

Pendapat di atas menunjukkan bahwa suatu fungsi dan peranan pada pengertiannya adalah sama, namun peranan dalam pengertian ini adalah mewakili suatu lembaga secara menyeluruh, karena pembahasan adalah peranan mewakili organisasi untuk melakukan suatu jabatan, tetapi ada beberapa diantara secara simbolis dapat mewakili yang bersangkutan secara total. Peranan seperti ini mempunyai makna strategis di dalam masyarakat,

sebab peranan tersebut tidak hanya mewakili lembaga sendiri melainkan juga merupakan faktor integratif antara seluruh lembaga. Penetapan kebijaksanaan umum dan perencanaan dan pelaksanaannya dilakukan pemerintah dapat dianggap sebagai peranan strategis, selain mereka bertindak sebagai perencana juga pelaksana dari semua planning.

Peranan dasar (strategis) di atas perlu diincikan dan dilaksanakan. Perincian dan pelaksanaan peranan inilah disebut sebagai peranan administratif yaitu pola perilaku yang diharapkan dari atau yang telah ditetapkan bagi pemerintah selaku peranan administrator pembangunan.

2. BAPPEDA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat BAPPEDA merupakan salah satu lembaga pemerintah yang mempunyai tugas khusus sebagai pelaksana perencanaan pembangunan, baik untuk daerah propinsi maupun daerah kabupaten di seluruh Indonesia.

Badan adalah sekumpulan orang yang mengerjakan sesuatu (WJS. Poerwadarminta, 1976 : 72). Apabila dilihat sebagai sekumpulan orang yang mengerjakan sesuatu tujuannya, maka ia berfungsi sebagai wadah kerjasama yang identik dengan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Badan Perencana Pembangunan Daerah kabupaten/kota yang selanjutnya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27/1980 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 185/1980 disebutkan bahwa "BAPPEDA" adalah badan staf yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati kepada daerah kabupaten/kota (1980 : 5). Dimana dalam membantu Bupati kepala daerah atau selaku staf yaitu membantu dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan di daerah kabupaten serta penilaian pelaksanaannya.

Adapun fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Barru adalah :

1. Menyusun pola dasar pembangunan daerah
2. Menyusun rencana program-program tahunan
3. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah
4. Melaksanakan koordinasi perencanaan antara instansi vertikal dan dinas daerah lainnya.
5. Memonitoring pelaksanaan pembangunan.
6. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan dengan petunjuk Bupati Kepada Daerah.
7. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut.

3. Perencanaan

Perencanaan mempunyai pengertian luas, yang pada dasarnya mencakup aspek apa yang perlu dikerjakan, sistimatik dan waktu yang ditentukan. Hal itu sesuai dengan pendapat Bintoro Tjakroamidjojo dalam perencanaan pembangunan (1983 : 12) mengatakan :

“Perencanaan adalah suatu program kegiatan usaha yang terus menerus dan menyeluruh dari penyusunan suatu rencana, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan”.

Selain pendapat tersebut oleh Soekartawi (1987 : 19) mengemukakan :

“Perencanaan berarti memilih alternatif dari sejumlah alternatif yang ada. Artinya dari sekian banyaknya alternatif maka perlu dipilih dalam menyusun perencanaan yang didasarkan atas skala prioritas”.

Oleh S. P. Siagian memberikan pengertian perencanaan didalam administrasi pembangunan (1989 : 4) mengemukakan :

“Perencanaan berarti pula pengalokasian sumber daya yang tersedia. Sumber daya ini dapat berupa alam, atau sumber daya manusia. Bagaimana pengalokasian sumber daya tersebut yang secara teoritis mudah diucapkan akan tetapi sulit dilaksanakan”.

Pendapat tersebut diatas menunjukkan bahwa perencanaan guna menentukan program/kegiatan, maka langkah awal untuk mencapai tujuan suatu organisasi sebagai wadah kerjasama dengan memanfaatkan berbagai sumber yang ada untuk melaksanakan berbagai tujuan yang dipilih dari berbagai alternatif.

Keberhasilan dari suatu organisasi sangat banyak ditentukan oleh bagaimana perencanaan yang telah disusun untuk dilaksanakan, sehingga dengan berbagai alternatif dengan skala prioritasnya lebih menuntut dilakukannya perencanaan. Karenanya, perencanaanlah yang menentukan tentang :

1. Apayang harus dilaksanakan
2. Kapan dilaksanakan
3. Di mana akan dilaksanakan
4. Bagaimana pelaksanaannya

Perencanaan adalah sesuatu yang telah ditentukan dan diputuskan untuk melaksanakan yang tentunya diarahkan semata-mata untuk mencapai tujuan.

Di dalam mencapai tujuan itu, maka suatu perencanaan sebaiknya mempunyai unsur-unsur, sebagai berikut :

1. Unsur tujuan, yaitu perumusan yang lebih jelas terperinci mengenai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Unsur keijaksanaan, yaitu metode atau cara untuk mencapai tujuan.
3. Unsur prosedur, yaitu meliputi pembagian tugas serta hubungan masing-masing anggota kelompok secara terperinci.
4. Unsur proses, yaitu menentukan tentang standar yang akan dicapai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Karena hal itu akan dapat memberikan jaminan keberhasilan pelaksanaan tujuan khususnya tujuan pembangunan.

4. Pembangunan

Dakam buku Administrasi Pembangunan karangan Prof. Dr. Siagian MPA, memberikan pengertian pembangunan (1983 : 2) sebagai berikut :

“Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha yang dilaksanakan secara sadar oleh bangsa dan negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangkaian pembangunan bangsa.”

Pengertian tersebut di atas dikaitkan dengan aktivitas, kegiatan dalam interaksi sosial untuk mencapai suatu kemajuan atau peningkatan baik dalam arti fisik maupun dalam arti mental spritual.

Pembangunan selalu menghendaki terselenggaranya perubahan-perubahan yang stabil dan dinamis. Pembangunan adalah suatu proses yang membawa kemajuan untuk mncapai keadaan yang lebih baik dari sebelumnya.

Sedangkan menurut Prof. Dr. H. Bintoro Tjakroamidjojo dalam buku Teori Strategi Pembangunan Nasional (1983 1) mengatakan :

“Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan untuk suatu usaha tanpa akhir.”

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah :

1. Dilaksanakan secara sadar.
2. Peningkatan taraf hidup.
3. Terus menerus dilakukan secara berencana.
4. Merupakan salah satu kualitas yang baru.

B. Pentingnya Perencanaan dalam Pembangunan

Di negara kita Republik Indonesia perencanaan program pembangunan sangat penting bagi sistem perekonomian yang ada, atau selalu dikaitkan dengan

amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara beserta segala penjelasannya.

Arah perencanaan termasuk sasaran yang ingin dicapai secara spesifik. Situasi semacam ini diperlukan, agar pembangunan benar-benar sejalan dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan amanat tersebut, maka sistem perencanaan di Indonesia adalah cenderung mengikuti sistem perencanaan gabungan antara sistem perencanaan pasar bebas (intervensi). Besar tidaknya bobot penekanan terhadap dua sistem tergantung pada aspek yang direncanakan sekaligus di operasionalisasikan. Demikian pula pada setiap perencanaan yang aktivitas diperlukan pola pendekatan yang berbeda-beda.

Dalam berbagai literatur perencanaan pembangunan, maka mengenai pentingnya perencanaan ini sering dikaitkan dengan aspek pembangunan yang diklasifikasikan Adriani dan Iswar (1986 : 17) mengemukakan :

- a. Perencanaan sebagai alat dari pembangunan ; dan
- b. Pembangunan sebagai tolak ukur dari berhasil atau tidaknya pembangunan tersebut."

Dari pendapat tersebut di atas disebutkan bahwa perencanaan itu sebagai "alat" pembangunan, karena perencanaan memang merupakan alat strategis dalam menuntun jalannya pembangunan. Suatu perencanaan yang disusun secara acak-acakan (tidak sistematis) tidak memperhatikan sasaran, maka pembangunan yang dihasilkan tidak seperti yang diharapkan.

Perencanaan pembangunan sebagai alat maupun sebagai tolak ukur, mempunyai keunggulan komprehensif, yang antara lain :

1. Perencanaan dapat dipakai sebagai alat untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik diharapkan dapat menghasilkan kegiatan pembangunan yang baik, bila faktor pendukungnya memenuhi persyaratan.
2. Perencanaan dapat dipakai sebagai alat penentuan berbagai kegiatan pembangunan. Dengan demikian, pemilihan alternatif yang baik atau yang terbaik sangat tergantung dari perencanaan yang telah disusun.
3. Perencanaan dapat dipakai sebagai penentuan skala prioritas. Hal demikian dapat dimengerti karena terbatasnya sumber daya yang bisa selalu dihadapi oleh para pelaksana pembangunan.
4. Perencanaan dapat dipakai sebagai alat peramalan (forecasting) dari kegiatan pada masa yang akan datang. Apakah yang akan menjadi lima tahun mendatang diramalkan melalui perencanaan yang dibuat sekarang. Dengan demikian, perencanaan yang baik akan menghasilkan yang baik di masa yang akan datang. Perencanaan ekonomi misalnya dapat meramalkan berapa pertumbuhan ekonomi tertentu pada kurun waktu lima tahun mendatang.

Berorientasi pada perencanaan sebagai alat pembangunan dan sebagai tolak ukur dari keberhasilan dan kegagalan dari pembangunan yang mengandung arti bahwa kegiatan pembangunan yang gagal bisa jadi karena aspek perencanaan yang tidak baik, dan begitu pula sebaliknya. Secara sistematis bahwa perencanaan

sebagai tolak ukur pelaksanaan pembangunan yang tidak baik mengakibatkan pelaksanaan yang tidak baik pula ataukah karena perencanaannya terdapat kendala sehingga perlu diketahui apa yang mengakibatkan timbulnya kendala dalam pelaksanaan pembangunan.

Perencanaan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan, perlu direvisi pada setiap saat atau pada jangka waktu tertentu. Maksudnya tentu saja untuk memperbaiki kesalahan masa lalu, agar diperbaiki pada perencanaan yang akan datang guna lebih meningkatkan keberhasilan pembangunan.

C. Perencanaan Pembangunan Sebagai Prinsip Pemerataan Pembangunan

Perencanaan pembangunan pada umumnya dilakukan oleh negara-negara berkembang, dan berusaha untuk mengembangkan menuju ke arah keadaan yang dianggap lebih baik. Keadaan yang dianggap baik itu adalah tujuan pembangunan. Ciri dari suatu perencanaan pembangunan yang bersifat usaha pencapaian tujuan pembangunan biasanya pula dengan perencanaan pemerintah sebagai pendorong pelaksanaan pembangunan.

Adapun ciri-ciri suatu perencanaan pembangunan yang bersifat usaha pencapaian tujuan pembangunan sesuai dengan pendapat Hendra Esmara (1985:112) mengemukakan:

1. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi.
2. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi.
3. Usaha perluasan kesempatan kerja.
4. Usaha pemerataan pembangunan.

5. Usaha agar kemampuan membangun secara bertahap lebih didasarkan pada kemampuan nasional.”

Berdasarkan dari pendapat tersebut diatas, bahwa perencanaan pembangunan lebih dirasakan sebagai suatu kebutuhan bagi masyarakat yang baru berkembang seperti Indonesia. Sehingga sering kali peranan pemerintah dilaksanakan atas dasar dan cara yang berencana.

Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang baru berkembang. Dan terjadinya perubahan-perubahan dalam keadaan yang sehat dan dinamis adalah salah satu dari segi lain yang penting dalam proses pembangunan nasional.

Pelaksanaan pembangunan nasional yang meliputi seluruh aspek kehidupan bangsa yang sangat kompleks ini tentu sangat dirasakan pentingnya perencanaan secara efektif dan efisien, sehingga dengan demikian diharapkan sasaran pembangunan tersebut dapat dicapai secara seoptimal mungkin berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

Perencanaan dapat dianggap sebagai suatu keharusan dalam pencapaian tujuan yang telah dirumuskan dalam berbagai bentuk program pembangunan. Hal ini dapat dimengerti bahwa perencanaan adalah salah satu dari berbagai fungsi administrasi.

Prof. Dr. Bintoro Tjokroamidjojo, MA, (1984 : 82) mengemukakan:

“Dalam suatu perencanaan pembangunan secara umum terdapat unsur-unsur pokok yaitu:

1. Kebijakan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan sering juga disebutkan sebagai tujuan, arah dan prioritas pembangunan, meliputi pula berbagai sasaran pembangunan.
2. Unsur pokok dasar yang kedua adalah adanya kerangka rencana.
3. Perkiraan sumber-sumber pembangunan merupakan unsur-unsur pokok dalam penyusunan rencana pembangunan.
4. Unsur pokok yang lain dalam perencanaan pembangunan adalah uraian tentang kebijaksanaan konsisten.
5. Unsur pokok kelima dari perencanaan adalah program investasi. Program investasi ini dilakukan secara sektoral misalnya dibidang perencanaan.
6. unsur pokok yang terakhir dalam perencanaan pembangunan adalah administrasi pembangunan.”

Perencanaan pembangunan yang harus memperhatikan kondisi masyarakat yang menunjukkan suatu perencanaan pembangunan dapat dilakukan.

Kegiatan pertama dan utama dalam pekerjaan perencanaan adalah perumusan dari pada kebijaksanaan dasar pembangunan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran perkembangan yang hendak ditempuh pada perencanaan pembangunan nasional/daerah.

Kebijaksanaan dasar pembangunan juga harus memperhatikan kondisi masyarakat yang menunjukkan apakah sesuatu perencanaan dapat dilakukan, ataukah penetapan kebijaksanaan rencana yang disesuaikan dengan tingkat dengan tingkat atau tahap pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat.

Kebijaksanaan tersebut diatas, menunjukkan bahwa pembangunan dirumuskan secara lebih terarah dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara yang dijadikan sebagai dasar pembangunan nasional.

Dari pendapat Bintoro Tjokroamidjojo, juga dikemukakan kebijaksanaan dasar pembangunan nasional adalah:

“Secara sistematis kebijaksanaan dasar pembangunan Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Tujuan nasional rumusannya adalah seperti yang tersebut dalam pembukaan UUD 1945. ini dianggap tujuan terus menerus bangsa Indonesia.
2. Tujuan pembangunan nasional secara singkat adalah tercapainya masyarakat adil dan makmur, merata material dan spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
3. Sebagai orientasi mencapai tujuan pembangunan nasional dirumuskan pula arah pembangunan jangka panjang. Rumusannya adalah pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Tentang manusia disebutkan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah, tentang mayarakat seluruh Indonesia meliputi dimensi antara golongan masyarakat, antar masyarakat di berbagai daerah, masyarakat generasi sekarang dengan generasi mendatang.
4. Pembangunan jangka panjang tersebut dilaksanakan secara bertahap dengan sasaran tercapainya landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri.
5. Titik berat pembangunan diletakkan pada pembangunan ekonomi.
6. pembangunan diluar bidang ekonomi dilaksanakan seirama dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi.
7. Dalam pelaksanaan pembangunan diberi perhatian pula terhadap orientasi keadilan, pemerataan pembangunan, perlu lapangan kerja dan partisipasi masyarakat”. (1974 : 84)

Salah satu kebijaksanaan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan nasional adalah pemerataan pembangunan diseluruh Indonesia, kebijaksanaan ini berlandaskan pada Trilogi Pembangunan yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju pada terciptanya kadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas yang sehat dan dinamis.

Pemerataan pembangunan ini tercermin dalam penyelenggaraan berbagai proyek pembangunan yang tersebar di berbagai daerah, baik bersifat pembangunan sektoral, maupun regional ataupun pembangunan daerah itu sendiri.

Kebijaksanaan pemerintah terhadap pemberian program pembangunan kepada daerah khususnya program pembangunan daerah dengan wujud nyata adanya bantuan dan sumbangan pemerintah yang lebih atas, berarti meningkatkan akan kemampuan bagi daerah kabupaten untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya. Hal ini akan membawa konsekuensi bagi daerah kabupaten untuk mengelola dana bantuan pemerintah, melalui sistem perencanaan yang efektif dan efisien.

Karena disadari bahwa tanpa usaha penyempurnaan di bidang perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien tidak akan diharapkan akan hasil pembangunan yang baik, sehingga kecendrungan kebijaksanaan pada prioritas pembangunan daerah adalah menyesuaikan kemampuan dan kondisi wilayah yang bersangkutan untuk melakukan pembangunan, baik perencanaan pembangunan dengan pembiayaan pendapatan asli daerah maupun bantuan dari pemerintah daerah propinsi dan pemerintah pusat yang diwujudkan sebagai realisasi pengusulan rencana pembangunan daerah.

Perlu pula diketahui bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang selain memberikan wewenang untuk membuat perencanaan sendiri pula memberikan bantuan dan sumbangan, karena

di dalam pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia diupayakan pemerataan pembangunan, sehingga adanya bantuan dana pembangunan daerah tiap tahunnya.



BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN BARRU

A. Keadaan Umum Kabupaten Barru

1. Luas dan Letaknya

Luas dan wilayah Kabupaten Barru adalah 1.174,72 km² yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan yang terbagi kedalam 24 desa/kelurahan.

Letak daerah Kabupaten Barru berada kurang lebih 90 km dari arah Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parepare
- Sebelah Timur : Kabupaten Soppeng
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pangkep
- Sebelah Barat : Selat Makassar

2. Keadaan Iklim

Mengenai iklim daerah Kabupaten Barru termasuk beriklim sedang mengingat terletak diatas ketinggian 0 sampai 1000 meter diatas permukaan laut, sehingga keadaan iklimnya pada siang hari bertiup angin arah timur, sedangkan pada malam hari angin bertiup dari arah barat. Temperatur udaranya berda sekitar $\pm 20^{\circ}\text{C} - 30^{\circ}\text{C}$, dimana pada siang hari tidak terlalu dingin. Oleh karena angin yang bertiup dari arah barat terjadi pada malam hari.

3. Keadaan Penduduk

Penduduk Kabupaten Barru sesuai data akhir tahun 2001, yaitu berjumlah 143.198 jiwa yang terdiri dari laki-laki berjumlah 68.023 jiwa dan perempuan 75.175 jiwa dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1. Keadaan Penduduk Kabupaten Barru Tahun 2003

No.	Kecamatan	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1.	Barru	15.982	17.558	33.540
2.	Soppeng Riaja	12.558	13.720	26.278
3.	Tanete Rilau	13.644	15.817	29.961
4.	Tanete Riaja	15.523	16.993	21.403
5.	Mallusetasi	10.316	11.087	21.403
Jumlah		68.023	75.175	143.198

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Barru, Tahun 2003

Tabel tersebut di atas terlihat bahwa Kabupaten Barru mempunyai penduduk 143.198 jiwa yang terdiri dari laki-laki 68.023 orang atau mencapai 47 persen, dan perempuan 75.175 orang atau mencapai 53 persen.

Daru tabel tersebut diatas pula terlihat kecamatan yang paling banyak penduduknya yaitu Kecamatan Barru keseluruhannya berjumlah 33.540 orang, Kecamatan Soppeng Riaja dengan penduduk 26.278 orang, Kecamatan Tanete Rilau dengan jumlah penduduk 29.961 jiwa, Kecamatan

Tanete Riaja dengan penduduk 32.516 jiwa, dan Kecamatan Mallusetasi dengan jumlah penduduk 21.403 jiwa.

Dari perincian keadaan penduduk Kabupaten Barru dilihat dari jumlah terbanyak adalah Kecamatan Barru yang sekaligus sebagai Ibukota Kabupaten Barru, menyusul Kecamatan Tanete Riaja, sebagai urutan kedua terbanyak dan Kecamatan Tanete Rilau dengan jumlah penduduk 29.962 jiwa sebagai urutan ketiga, dan Kecamatan Soppeng Riaja, dan yang paling kurang adalah Kecamatan Mallusetasi.

B. Gambaran Umum BAPPEDA Kabupaten Barru

Badan Perencanaan pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Barru, adalah badan staf yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Barru, dengan membantu tugas-tugas Bupati dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan di daerah serta penilaian atas pelaksanaan pembangunan.

Pada tingkat daerah, khususnya BAPPEDA tingkat Kabupaten Barru sangat berperan dalam mengkoordinir seluruh kegiatan yang menyangkut pelaksanaan rencana tahunan. BAPPEDA mempunyai peranan di dalam menentukan dan mengkoordinir seluruh usulan-usulan proyek yang akan dilaksanakan di daerah, dan menyusun perencanaan serta penentuan platform anggaran setiap tahunnya bersama-sama dengan aparat pemerintah daerah lainnya.

Dalam menyelenggarakan tugasnya BAPPEDA Kabupaten Barru mempunyai fungsi antara lain:

1. Menyusun pola dasar pembangunan daerah
2. Menyusun rencana program-program tahunan
3. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah
4. Melaksanakan koordinasi perencanaan antara instansi vertikal dan dinas daerah lainnya.
5. Memonitoring pelaksanaan pembangunan
6. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati Kepala Daerah
7. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut.

Adapun struktur organisasi Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) di kabupaten adalah:

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bidang penelitian
4. Bidang Ekonomi
5. Bidang Sosial Budaya
6. Bidang Fisik dan Prasarana
7. Bidang Statistik dan Laporan

Untuk lebih menggambarkan susunan organisasi dan tugas-tugas setiap bidang, sekretaris, seksi dan urusan-urusan, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ketua, mempunyai fungsi/tugas memimpin dan mengkoordinir seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari sekretaris, bidang-bidang dan para kepala urusan dengan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi menuju pencapaian daya guna dan hasil guna.
2. Sekretaris, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
3. Bidang penelitian, mempunyai tugas melaksanakan atau mengkoordinir kegiatan penelitian di bidang ekonomi, sosial budaya serta fisik dan prasarana.
4. Bidang ekonomi, mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi, pengembangan dunia usaha.
5. Bidang sosial dan budaya, mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan mental spritual, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan.
6. Bidang fisik dan prasarana, mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah sumber alam dan lingkungan hidup.

7. Bidang statistik dan laporan, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan analisa, penilaian dan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah.

C. Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Barru

Struktur organisasi BAPPEDA Kabupaten Barru, disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1983, maka ketua BAPPEDA sebagai pimpinan organisasi membawahi:

1. Sekretariat, dibantu:
 - a. Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan
 - b. Urusan Keuangan
 - c. Urusan Umum
2. Bidang Penelitian dan laporan, dibantu:
 - a. Seksi Pengumpulan Dana
 - b. Seksi Analisa dan Penilaian
 - c. Seksi Laporan
 - d. Seksi Statistik dan Dokumentasi
3. Bidang Ekonomi, dibantu:
 - a. Seksi Pertanian
 - b. Seksi Industri Pertambangan dan Energi
 - c. Seksi pengembangan Dunia Usaha
4. Bidang Sosial Budaya dibantu:
 - a. Seksi Mental Spritual dan Pemerintahan

- b. Seksi Kesejahteraan Rakyat
 - c. Seksi Penerangan dan Komunikasi
 - d. Seksi Kependudukan
5. Bidang Fisik dan Prasaran, dibantu:
- a. Seksi Pengairan
 - b. Seksi Perhubungan dan Pariwisata
 - c. Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah
 - d. Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas maka Kantor BAPPEDA Kabupaten Barru mempunyai pegawai 18 orang dengan perincian menurut pangkat dan golongan sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 2. Keadaan Pegawai Kantor BAPPEDA Kabupaten Barru Tahun 2003

No.	Bidang Tugas	Golongan/Pangkat				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Ketua	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat		1	1	-	2
3.	Bidang Pendataan Dan Laporan		3	2	-	5
4.	Bidang Ekonomi		2	1	-	3
5.	Bidang Sosial Budaya		2	2	-	4
6.	Bidang Prasarana Fisik		2	1	-	3
Jumlah		1	10	7	-	18

Sumber : Kantor BAPPEDA Kabupaten Barru, Tahun 2003

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa jumlah pegawai Kantor BAPPEDA Kabupaten Barru yaitu 18 orang, dengan klasifikasi golongan 1 orang berada pada golongan IV sekaligus sebagai ketua golongan III sebanyak 10 orang dan golongan II sebanyak 7 orang.

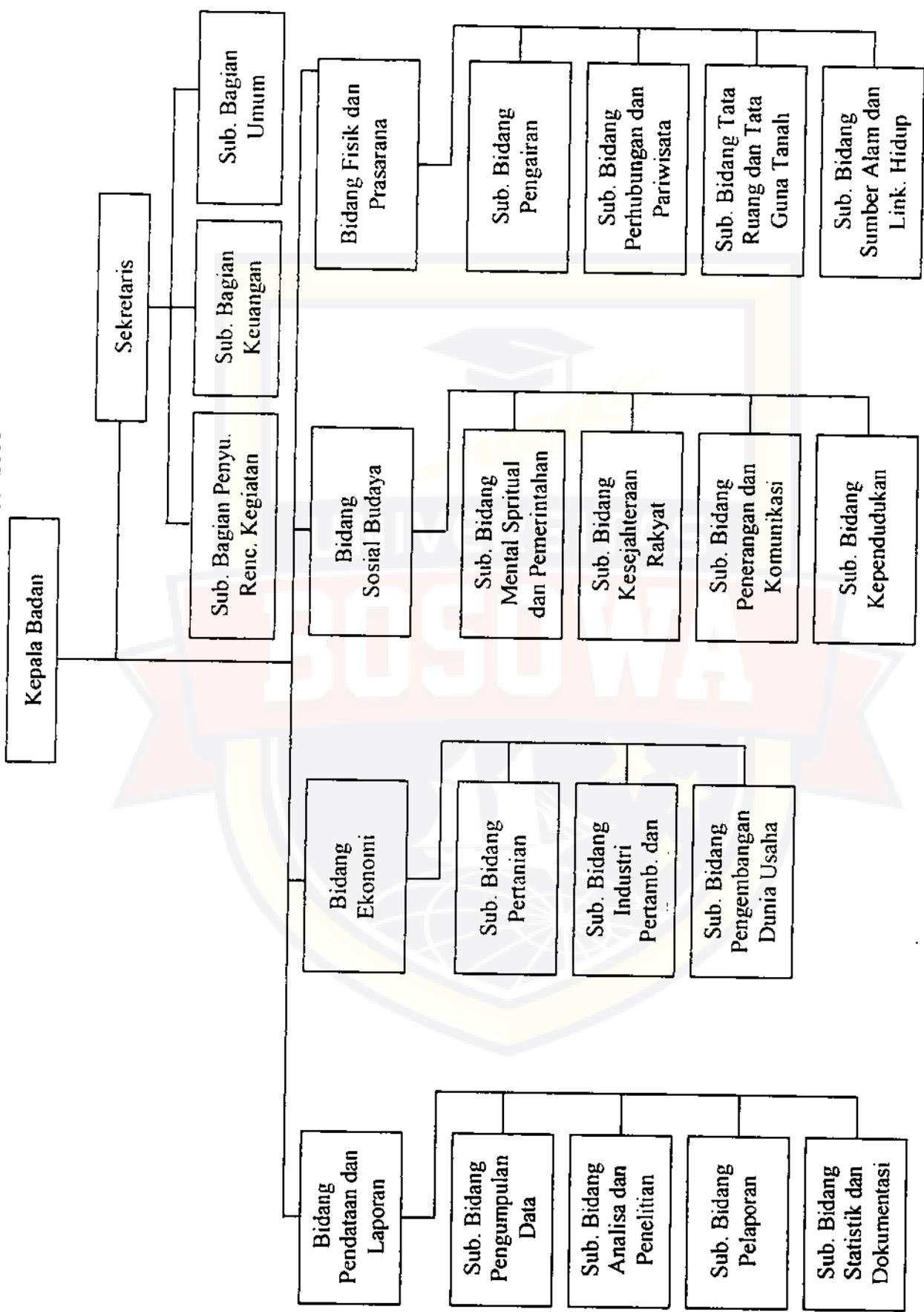
Selain dari segi golongan/kepangkatan juga diuraikan keadaan pendidikan sebagai berikut:

Tabel 3. Keadaan Pendidikan Formal Pegawai Kantor BAPPEDA Kabupaten Barru Tahun 2003

No.	Bidang Tugas	Sarjana	Sarmud	SLTA	SLTP	SD	Jml
1.	Ketua	1	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	2	-	-	-	-	2
3.	Pendataan dan Laporan	2	-	2	-	-	4
4.	Ekonomi	2	1	-	-	-	3
5.	Sosial Budaya	2	-	2	-	-	4
6.	Prasarana	2	-	2	-	-	4
Jumlah		11	1	6	-	-	18

Sumber: Kantor BAPPEDA Kabupaten Barru, Tahun 2003

Tabel tersebut diatas menunjukkan keadaan tingkat pendidikan formal pegawai kantor BAPPEDA Kabupaten Barru yang terdiri dari 11 orang sarjana, 1 orang sarjana muda, dan 6 orang yang mempunyai tingkat pendidikan sekolah lanjutan atas.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Fungsi BAPPEDA Kabupaten Barru

BAPPEDA Kabupaten Barru dalam menjalankan fungsinya sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18/1980, serta peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1982, maka dalam kurun sejak terbentuknya BAPPEDA sebagai Badan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten, khususnya di Kabupaten Barru, maka fungsinya dijabarkan secara nasional sebagai berikut:

1. Menyusun pola dasar pembangunan Kabupaten Barru.
2. Menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Memonitoring pelaksanaan pembangunan di daerah.
4. Melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah.
5. Mengadakan penelitian untuk pemencanaan pembangunan daerah.
6. Mengikuti persiapan dan pengembangan pelaksanaan rencana untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut.
7. Menyusun program tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk menjadi pedoman bagi Bupati Kepala Daerah Kabupaten Barru.

Bupati Kepala Daerah Kabupaten Barru dalam menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah, yang dalam hal ini dibantu dan dilaksanakan BAPPEDA

Kabupaten Barru di dalam menentukan kebijaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan penilaian pelaksanaannya.

BAPPEDA Kabupaten Barru dalam melakukan fungsinya menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah dilakukan secara bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Sekretaris Daerah, Dinas-dinas Daerah dan Instansi Vertikal yang ada di Wilayah Kabupaten Barru sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dalam menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang secara teknis dan operasional adalah menyiapkan segala kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan, yang hal itu sesuai dengan wawancara ketua BAPPEDA Kabupaten Barru mengatakan BAPPEDA dalam penyusunan rencana adalah: "Menyiapkan data luas wilayah daerah, keadaan geografis, keadaan iklim, keadaan penduduk dan tingkat pertumbuhan penduduk".

BAPPEDA Kabupaten Barru dalam menjabarkan dan melaksanakan fungsi sebagai Badan Perencanaan Pembangunan, terealisasi kegiatan sesuai dengan hasil penelitian maka ditemukan pelaksanaan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Fungsi Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah

Pola Dasar pembangunan daerah Kabupaten Barru adalah garis-garis besar kebijaksanaan dan arah pembangunan dalam rangka pengembangan wilayah Kabupaten Barru ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan

memperhatikan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat di daerah dan sebagai dasar dari pembangunan selanjutnya.

Pembangunan daerah Kabupaten Barru adalah merupakan sub sistem dari Pembangunan Nasional. Jadi pembangunan daerah Kabupaten Barru merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional. Karena itu Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan aspirasi dan kondisi di daerah dalam rangka pelaksanaan GBHN di daerah Kabupaten Barru.

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten yang dilaksanakan BAPPEDA Kabupaten Barru sesuai GBHN dan yang dijabarkan ke dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah, keadaan tenaga kerja dan angkatan kerja, keadaan luas lahan dan keadaan tanah, mata pencaharian penduduk dan kemungkinan pengembangannya, rencana perkotaan dan lain-lainnya.

Data tersebut inilah yang akan dijadikan titik tolak dalam penyusunan kerangka/Pola Dasar Pembangunan Daerah yang akan disusun menurut prioritas setiap tahunnya sehingga dalam penyusunan perencanaan pembangunan sudah tergambar tentang apa yang akan dicapai pada setiap tahun anggaran pembangunan Kabupaten Barru.

Untuk memberikan gambaran mengenai potensi yang ada dan wujud masa depan pembangunan daerah Kabupaten Barru yang diinginkan dalam konteks pembangunan Nasional maupun konteks pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, baik dalam kurun waktu lima tahun yang akan

datang maupun untuk jangka panjang dan agar terlihat korelasi yang terdapat dalam Pola Dasar Pembangunan Propinsi Sulawesi Selatan serta Garis-garis Besar Haluan Negara, maka Pola Dasar Pembangunan Daerah, disusun secara sistematis.

2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Sebagaimana diketahui bahwa dalam penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah, terdiri atas: Pola Dasar Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Jangka Pendek, maka penyusunan rencana Pembangunan Jangka Pendek merupakan penjabaran dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Barru. Maka setiap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Pendek itu bertujuan untuk:

1. Meningkatkan taraf hidup dan kecerdasan serta kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat yang semakin merata dan adil.
2. Menjadi landasan yang kuat dan kokoh untuk tahap pelaksanaan pembangunan berikutnya.

Untuk mengkonkritkan di dalam pelaksanaan pembangunan ini, maka dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Pendek harus selalu bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya untuk terciptanya keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah BAPPEDA Kabupaten Barru selalu memperhatikan dan mengadakan evaluasi pelaksanaan pembangunan pada sektor pemerintahan.

Yang menjadi perhatian BAPPEDA dalam menyusun setiap Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah sesuai hasil wawancara (indepht interview):

- “ 1) Tahap-tahap kegiatan
- 2) Bentuk dari kegiatan
- 3) Tentang apa yang harus dikerjakan
- 4) Pelaksanaan dari setiap kegiatan
- 5) Jadwal waktu kegiatan
- 6) Hasil yang harus dicapai dalam setiap kegiatan.”

Waktu penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Barru paling lambat 12 bulan sebelum waktu dan tahun pelaksanaannya. Olehnya itu BAPPEDA Kabupaten Barru selalu dan telah tersedia data tentang pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Pendek sebelumnya. Kegiatan dan hasil-hasil pelaksanaan dari masing-masing instansi, dinas daerah pada lingkungan sekretariat daerah serat pada setiap kecamatan.

Selain itu hasil evaluasi pelaksana Rencana Pembangunan Jangka Pendek sebelumnya, akan menjadi bahan dasar dari pelaksana Rencana

Pembangunan Jangka Pendek berikutnya atau akan disusun, dengan indikator utama yang harus diperhatikan adalah :

- 1). Sejauh mana ketepatan kebijaksanaan-kebijaksanaan pokok pembangunan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Pendek yang lalu dapat dilaksanakan dan digapai.
- 2). Mengadakan inventarisasi masalah-masalah pokok yang belum dapat terealisasikan, begitu pula kalau ada masalah baru.
- 3). Sektor-sektor dan bidang-bidang jasa yang telah dicapai menurut target yang telah ditentukan dan sebaliknya yang belum dicapai.
- 4). Bagaimana penentuan wilayah/daerah pembangunan menurut sektor dan bidang, apakah saling mendukung dan sebagainya.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, maka BAPPEDA Kabupaten Barru mengadakan kegiatan- kegiatan yang antara lain adalah :

- 1). Melaksanakan diskusi-diskusi, seminar-seminar, konsultasi-konsultasi dengan pihak instansi/ dinas daerah, kegamatan dan sebagainya.
- 2). Melaksanakan kegiatan analisis data seperti data pelaksana pembangunan, peraturan dan kebijaksanaan yang pernah dibuat dan lain-lain.
- 3). Mengadakan pengkajian dari data-data yang disebutkan dari hasil diskusi dengan keadaan lapangan.

Apabila hal-hal yang telah dikemukakan di atas telah dapat terselesaikan dengan data pendukung yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan daerah, maka BAPPEDA Kabupaten Barru dalam menentukan

tujuan dan arah setiap Rencana Pembangunan Jangka Pendek, dan untuk kegiatan ini ada beberapa hal yang dijadikan pertimbangan pokok dalam peklaksanaan fungsi perencanaan, yaitu :

- 1). Mempelajari tujuan dan arah pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam GBHN dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Nasional, maupun Rencana Pembangunan Jangka Pendek Propinsi.
 - 2). Mengadakan perkiraan tentang dana-dana dan daya yang dimiliki daerah pada saat sekarang maupun pada saat yang akan datang.
 - 3). Memperkirakan tingkat pertumbuhan yang dikehendaki berdasarkan perhitungan sumber-sumber yang tersedia.
 - 4). Mengadakan perkiraan mengenai sumbangan tiap sektor bagi pencapaian target pertumbuhan dan perkembangan daerah serta upaya pemecahan atau masalah yang dihadapi.
 - 5). Menetapkan tujuan dan arah serta sasaran rencana pembangunan jangka pendek yang telah bersifat sementara baik kualitas maupun kuantitas yang perlu diuji, untuk ditetapkan sebagai arah tujuan pembangunan daerah.
- 3. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Sebagaimana telah disebutkan pada halaman terdahulu bahwa salah satu fungsi BAPPEDA Kabupaten Barru ialah bersama-sama dengan bagian keuangan sekretariat daerah kabupaten menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan koordinasi dan kerjasamanya guna prioritas perencanaan program tahunan di Kabupaten Barru.

Tugas penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun oleh BAPPEDA Kabupaten Barru ini merupakan operasional pembangunan tahunan dan sebagai jabaran dari rencana pembangunan jangka pendek, maka dalam pelaksanaannya dibutuhkan dana keuangan untuk membiayai program/proyek dan kegiatan rutin dan pembangunan.

Pelaksanaan tugas fungsi perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja ini merupakan kelanjutan dari koordinasi perencanaan, namun karena dalam pelaksanaan program pembangunan di Indonesia menganut prinsip anggaran berimbang, sehingga selain perencanaan program/proyek yang telah dilakukan dan kerja sama dengan Dinas-dinas Daerah. Instansi vertikal dilanjutkan perencanaan dengan kerja sama pihak keuangan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Barru guna menyelesaikan sumber-sumber keuangan yang akan digunakan untuk membiayai rencana tahunan.

Setelah perhitungan biaya-biaya untuk anggaran rutin dan pembangunan yang akan diprogram, maka untuk menjadikan sebagai peraturan daerah atau Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tugas kelanjutan perhitungannya dialihkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Barru untuk dijadikan peraturan daerah.

BAPPEDA Kabupaten Barru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut :

- 1). Penerimaan usul proyek pembangunan dari seluruh kecamatan dan dinas-dinas daerah Kabupaten, maupun rencana proyek dari Propinsi dan pusat yang dialokasikan di daerah Kabupaten Barru.
- 2). Usul program/proyek dari kecamatan ini didasarkan atas hasil konsultasi atau musyawarah di tiap kecamatan.
- 3). Dari hasil-hasil usul program/proyek ini diadakan penelitian, penilaian dan penentuan hasil unsur prioritas yang perlu dilaksanakan untuk dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, karena penyusunan proyek tersebut harus selalu berdasarkan atas kemampuan Daerah, sepanjang biaya atau sumber dananya melalui APBN, maka hal itu tidak dipersoalkan.

Apabila semua sudah direncanakan dengan dukungan biaya yang diperkirakan dapat tersedia, maka disusunlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bekerjasama dengan bagian keuangan kantor sekretariat daerah kabupaten dan Bupati Kepala Daerah untuk dibahas dalam sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Barru, dan dari kegiatan inilah menentukan besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Barru yang termasuk anggaran pembangunan yang direncanakan sebelumnya ditetapkan.

Kerjasama BAPPEDA dengan Kantor Sekretariat Daerah karena masalah keuangan dan pembiayaan maupun sumber-sumber merupakan tugas

kantor sekretariat, sehingga perlu adanya mekanisme kerja guna perencanaan anggaran berimbang.

Sedangkan kerjasama dengan Bupati Kepala Daerah, karena keberadaan BAPPEDA sebagai pembantu Bupati, dimana pada pelaksanaan tugas perlu sesuai dengan kebijaksanaan dan persetujuan serta kehendak Bupati Kepala Daerah Kabupaten Baru.

B. Fungsi dalam Koordinasi Rencana Pembangunan Daerah

Pelaksanaan pembangunan akan mencapai hasil bilamana ditunjang oleh sistem perencanaan yang efektif dan efisien, oleh sebab itu penyempurnaan rencana pembangunan merupakan usaha penting guna menunjang dan mensukseskan pelaksanaan program/proyek pembangunan daerah.

BAPPEDA Kabupaten Baru dalam melaksanakan fungsinya sedapat mungkin mengetahui semua masalah dan hambatan-hambatan yang timbul dalam setiap pelaksanaan program/proyek pembangunan, baik masa lalu sebagai pengalaman maupun yang sedang atau yang datang sebagai penyusunan rencana pembangunan daerah.

Peranan yang dimaksud dalam pembahasan adalah pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban BAPPEDA sesuai dasar pembentukannya yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 dan peraturan Kabupaten Baru Nomor 10 Tahun 1980 seperti telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya.

Sesuai hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dari pelaksanaan fungsi BAPPEDA Kabupaten Barru, maka yang paling menonjol dalam pelaksanaannya adalah salah satunya pelaksanaan fungsi koordinasi dalam perencanaan, selain peranannya dalam memonitoring dan mengevaluasi proyek pelaksanaan di Kabupaten Barru.

Koordinasi yang dimaksud untuk menyerasikan antara garis kebijaksanaan perencanaan pembangunan nasional dengan kepentingan daerah Kabupaten Barru untuk mencapai sasaran yang direncanakan sebelumnya, begitu pula pada pelaksanaan dan perencanaan pembangunan diperlukan koordinasi yang terpadu baik antara BAPPEDA Kabupaten Barru dengan Bupati Barru, maupun antara BAPPEDA dengan instansi vertikal/Dinas-dinas Daerah, agar terciptanya tertib pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Barru.

BAPPEDA Kabupaten Barru sebagai staf Bupati yang membantu menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan serta penilaian atas pelaksanaannya hendaknya menyadari pula akan kedudukannya, tugasnya melakukan koordinasi demi kelanjutan serta sinkronisasi pembangunan.

Mengingat program/proyek pembangunan yang diusulkan mencakup berbagai aspek pembangunan dan berbagai sumber pembiayaan, maka dalam proses penyusunan rencana dan pengusulannya masalah koordinasi dan keterpaduan perlu mendapat perhatian utama. Adapun mekanisme koordinasi perencanaan pembangunan yang ditempuh BAPPEDA Kabupaten Barru mengupayakan keterpaduan pembangunan di daerah adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pertama

Dalam melaksanakan fungsi sebagai koordinasi perencanaan pembangunan dilakukan melalui diskusi pembangunan tingkat desa, yang mana dalam pelaksanaan fungsi sebagai koordinasi perencanaan pembangunan adalah melakukan pengarahan-pengarahan tentang cara inventarisasi, identifikasi masalah dan penyusunan usulan rencana program/proyek kepada kepala desa, pejabat urusan pembangunan desa dan kepada camat setempat.

Sebagai badan perencanaan pembangunan daerah, maka pihak BAPPEDA Kabupaten Barru dalam memperlancar pelaksanaan fungsinya maka mulai dari bawah melakukan pembenahan tugas, yaitu diskusi pembangunan tingkat desa yang dilakukan LKD yang dipimpin oleh kepala desa/lurah yang bersangkutan dengan bimbingan camat setempat dan dibantu oleh kepala urusan pembangunan desa kecamatan, akan melalui diskusi ini dibahas inventarisasi potensi desa.

Permasalahan-permasalahan sekaligus saran pemecahannya dan selanjutnya penyusunan usulan rencana program/proyek pembangunan, baik dipersiapkan untuk pembiayaan swadaya desa sendiri maupun yang diusulkan untuk bantuan pembangunan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja di Kabupaten dan provinsi serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk selanjutnya diteruskan dan dibahas pada tingkat kecamatan yang disebut Temu Karya Pembangunan Tingkat Kecamatan.

Disadari bahwa kemampuan perencanaan dari bawah terutama dari desa masih kurang, oleh karena aparat desa masih mengharapkan bimbingan dan pengarahan perencanaan dari aparat perencana dalam hal ini BAPPEDA Kabupaten Barru tidak dapat melepaskan begitu saja pelaksanaan diskusi ini. Untuk mencegah jangan sampai hasil-hasil diskusi tersebut hanya akan merupakan daftar keinginan yang tidak didasarkan kepada kebutuhan utama dari desa yang bersangkutan.

Untuk itu jauh sebelum diskusi pembangunan desa ini dilaksanakan, maka BAPPEDA Kabupaten Barru sebagai Badan Perencana Pembangunan Kabupaten Barru memberikan pengarahan tentang cara inventarisasi, identifikasi masalah penyusunan usulan rencana program/proyek, kepada para kepala desa, pejabat urusan pembangunan desa dan camat setempat.

BAPPEDA sebagai koordinasi perencanaan pembangunan di Kabupaten Barru dalam diskusi tingkat desa melalui pelaksanaannya oleh responden pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Keterangan Responden Mengenai Koordinasi Perencanaan pada Diskusi Pembangunan Tingkat Desa di Kabupaten Barru

No.	Keterangan Responden	Frekwensi	Prosentase (%)
1.	Aktif	13	40,63
2.	Kurang aktif	10	31,25
3.	Tidak aktif	9	28,13
	Jumlah	32	100,00

Sumber: Data Primer yang Diolah Tahun 2003

Pelaksanaan tugas sebagai koordinasi perencanaan pembangunan oleh BAPPEDA Kabupaten Barru dalam diskusi pembangunan tingkat desa/kelurahan se-Kabupaten Barru dinilai responden yaitu, untuk kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh BAPPEDA tingkat Kabupaten terdapat jawaban responden 13 orang atau 40,63 % memberikan keterangan koordinasinya aktif, dan 10 orang atau 31,25 % menilai kurang aktif serta 9 jawaban responden mengatakan tidak aktif atau 28,13 %. Koordinasi perencanaan ini dilaksanakan BAPPEDA Kabupaten Barru, sehingga dari keterangan responden tersebut dinilai bahwa koordinasi perencanaan dalam pelaksanaan dan persiapan diskusi pembangunan tingkat desa/kelurahan pelaksanaannya cukup aktif setiap tahunnya, dilakukan dalam rangka kepentingan perencanaan program/proyek pembangunan tingkat kabupaten.

2. Tahap Kedua

Koordinasi perencanaan pembangunan yang dilakukan BAPPEDA Kabupaten Barru pada tahap kedua adalah diskusi pembangunan tingkat kecamatan se-Kabupaten Barru yang pelaksanaannya dipimpin oleh camat yang bersangkutan dan utusan dari LKD wilayah kecamatan yang bersangkutan dengan bimbingan ketua BAPPEDA Kabupaten Barru dan dibantu oleh Kepala Kantor Pembinaan Desa, Instansi Vertikal dan Dinas-dinas Daerah turut hadir dalam diskusi pembangunan tingkat kecamatan ini.

Temu karya pembangunan tingkat kecamatan ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan-rumusan sebagai berikut:

- a. Usul rencana program/poryek yang akan dibiayai oleh swadaya masyarakat desa/kelurahan yang bersangkutan, bantuan pembangunan desa/kelurahan dikembalikan kepada desa/kelurahan yang bersangkutan.
- b. Usul rencana program/proyek yang sudah diseleksi akan dibiayai oleh APBD, tingkat Kabupaten propinsi bantuan inpres dan APBN diteruskan kepada Bupati kepala daerah untuk selanjutnya sibahas dalam forum koordinasi pembangunan di Kabupaten.

Dengan melihat rumusan-rumusan yang harus dihasilkan oleh diskusi pembangunan tingkat kecamatan sebagaimana dijelaskan di atas, maka instansi vertikal/dinas daerah mentabulasikan seluruh program/proyek yang telah diusulkan oleh desa-desa untuk melaksanakan melalui swadaya masyarakat dan atau melalui inpres bantuan desa. Dalam mentabulasikan seluruh program/proyek pembangunan yang diusulkan oleh desa tersebut, pihak instansi vertikal/dinas daerah tetap berada di bawah bimbingan BAPPEDA Kabupaten Barru.

Dengan pelaksanaan tugas BAPPEDA Kabupaten Barru dalam koordinasi perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan sewilayah Kabupaten Barru dinilai pelaksanaannya oleh responden sebaai berikut :

Tabel 5. Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan di Kabupaten Barru Tahun 2001

No.	Keterangan Responden	Frekwensi	Prosentase (%)
1.	Aktif	14	43,75
2.	Kurang aktif	11	36,37
3.	Tidak aktif	7	21,88
	Jumlah	32	100,00

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2003

Pada tabel tersebut di atas terlihat bahwa pelaksanaan tugas BAPPEDA Kabupaten Barru dalam koordinasi perencanaan pembangunan di wilayah terlihat dari tanggapan responden yaitu 14 orang atau sekitar 43,75 % yang memberikan penilaian aktif pelaksanaannya, 11 orang yang memberikan penilaian kurang aktif koordinasi perencanaannya pada tingkat kecamatan atau 36,37 %. Yang memberikan penilaian tidak aktif yaitu 7 orang atau 21,88 % responden, sehingga dari penilaian tersebut, maka dalam pelaksanaan fungsinya sebagai koordinasi perencanaan pembangunan sesuai dengan penilaian tersebut di atas adalah aktif setiap tahunnya, karena hasil dari diskusi pembangunan tingkat kecamatan merupakan langkah memulai perencanaan pembangunan Kabupaten Barru setiap tahunnya.

3. Tahap Ketiga

Hasil rapat koordinasi perencanaan pembangunan tingkat kecamatan yang telah diusulkan dan dibahas di tingkat BAPPEDA dan para peserta rapat koordinasi pembangunan tingkat kabupaten ini adalah seluruh camat, dinas-

dinas daerah dan instansi vertikal dan satuan organisasi yang ada di wilayah Kabupaten Barru pelaksanaan Rakorbang dipimpin langsung oleh Bupati Kabupaten Barru.

Rapat koordinasi pembangunan tingkat kabupaten diharapkan dapat menghasilkan rumusan-rumusan untuk usulan program/proyek pembangunan sebagai berikut :

- a. Rencana program/proyek yang akan dibiayai oleh APBD Asli Kabupaten Barru.
- b. Rencana program/proyek oleh APBD tingkat Propinsi.
- c. Rencana program/proyek yang akan dibiayai dengan usul lewat sektoral instansi vertikal di Propinsi.
- d. Rencana program/proyek yang akan dibiayai oleh proyek khusus (bantuan Presiden) kerjasama luar negeri, dan sebagainya.

Oleh sebab itu dalam rapat koordinasi pembangunan ini, Bupati Kabupaten Barru meminta kepada Dinas-dinas Daerah, instansi vertikal dan satuan organisasi lainnya dalam lingkungan wilayah Kabupaten Barru untuk mengajukan usul rencana program pembangunan untuk tahun anggaran berikutnya.

Di samping itu, BAPPEDA Kabupaten Barru mempersiapkan patokan pengusulan rencana program/proyek pembangunan bagi instansi vertikal dan Dinas-dinas daerah berupa garis-garis permasalahan yang dihadapi, dan hasil-hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Instansi vertikal dan dinas-dinas daerah dalam memperhatikan usul-usul BAPPEDA tingkat kabupaten sebagaimana yang disebutkan di atas, maka instansi vertikal dan Dinas-dinas Daerah mengajukan analisa pendahuluan tentang kelayakan yang berisi :

- 1). Jumlah modal awal yang dibutuhkan dan biaya operasional setiap tahun.
- 2). Hasil penilain keuangan atas program/proyek pembangunan bilamana dapat dinilai.
- 3). Lokasi yang paling sesuai untuk program/proyek dan alternatif cadangan lokasi lainnya.
- 4). Dukungan kerja sama antar lembaga untuk pelaksanaan proyek.

Dalam mensukseskan tugas sebagai badan perencanaan di Kabupaten Barru maka dilakukan berbagai upaya persiapan penyusunan rencana dengan koordinasi perencanaan dengan Bupati Kabupaten Barru dan Dinas-dinas Daerah dan instansi vertikal, serta lembaga organisasi pemerintahan lainnya guna kepentingan perencanaan pembangunan.

Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan untuk persiapan program/proyek tahun berikutnya, yaitu mengadakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum (PU) agar mereka dapat membuat dan mneyusun rencana anggaran program/proyek pembangunan yang akan dilakukan dengan menyertai dengan kelayakannya.

Dalam melakukan fungsinya koordinasi sebagai kerja sama dengan instansi vertikal dan dinas-dinas daerah di Kabupaten Barru guna kepentingan

pelaksanaan fungsi sebagai Badan Perencanaana Pembangunan. Kegiatan ini sesuai dengan responden dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 6. Keterangan Responden Mengenai Pelaksanaan Fungsi BAPPEDA dalam Rakorbang Kabupaten Barru Tahun 2001

No.	Keterangan Responden	Frekwensi	Prosentase (%)
1.	Aktif	18	56,25
2.	Kurang aktif	12	37,50
3.	Tidak aktif	2	6,25
	Jumlah	32	100,00

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2003

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai badan perencana pembangunan di Kabupaten Barru, maka BAPPEDA melakukan koordinasi dengan pemerintah/Bupati, instansi vetikal dan dinas-dinas daerah se-Kabupaten Barru yang mana dalam pelaksanaan tugasnya ini dinilai 18 orang atau 56,25 % responden adalah pelaksanaan tugasnya ini aktif, karena sebelumnya itu mereka menyediakan patokan pengusulan dan membantu dalam membuat pengusulan rencana program/proyek pembangunan, sehingga dengan inilah dinilai 12 orang atau 37,50 % dari responden mengatakan kurang aktif dan hanya 2 orang atau 6,25 % menilai pelaksanaan koordinasi perencanaan yang dilakukan BAPPEDA adalah tidak aktif.

Dari gambaran penilaian responden mengenai koordinasi pembangunan pada Kabupaten Barru sebagai tugas dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Barru adalah aktif, perencanaan tahap ketiga rapat koordinasi

pembangunan sangat menentukan, karena sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barru yang pelaksanaannya melalui proses dari bawah ke atas dan ditetapkan pada sidang pleno DPRD Kabupaten Barru.

C. Fungsi Memonitoring Pembangunan Daerah

Memonitoring pelaksanaan pembangunan di daerah merupakan salah satu fungsi BAPPEDA Kabupaten Barru yang dilakukan dengan jalan mengadakan kontak-kontak dengan pimpinan program dan proyek pada setiap instansi dan dinas-dinas daerah maupun instansi vertikal guna perencanaan pembangunan, baik untuk rencana pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek atau biasanya disebutkan program tahunan.

Adapun pelaksanaan fungsi monitoring BAPPEDA Kabupaten Barru dalam rangka kepentingan perencanaan pembangunan dinilai responden sebagai berikut :

Tabel 7. Keterangan Responden Mengenai Pelaksanaan Fungsi Monitoring Program/Proyek oleh BAPPEDA Kabupaten Barru Tahun 2001

No.	Keterangan Responden	Frekwensi	Prosentase (%)
1.	Aktif	15	46,88
2.	Kurang aktif	15	46,88
3.	Tidak aktif	2	8,24
	Jumlah	32	100,00

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2003

Dari tabel tersebut di atas, bahwa pelaksanaan fungsi BAPPEDA dalam memonitoring program/proyek pembangunan dinilai 15 orang atau 46,88 % kegiatannya aktif, 15 orang atau 46,88 % mengatakan kurang aktif dan hanya 2 orang atau 8,24 % memberikan penilaian tidak aktif. Sehingga dari penilaian responden menunjukkan bahwa BAPPEDA dalam melaksanakan fungsi sebagai monitoring adalah kurang aktif terhadap program/proyek pembangunan Kabupaten Barru.

Dalam memonitoring program/proyek BAPPEDA berusaha melakukan kontak-kontak pihak terkait guna mengetahui sebab, sehingga terjadi penyimpangan yang selanjutnya diambil kebijaksanaan korektif untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi dan diketemukan.

Pada dasarnya BAPPEDA Kabupaten Barru tidak mempunyai fungsi melakukan pengawasan pembangunan, akan tetapi pengawasan yang dilakukan BAPPEDA Kabupaten Barru sebagaimana dijelaskan Ketua BAPPEDA Kabupaten Barru adalah dalam bentuk monitoring pembangunan dan proyek yang telah direncanakan dan berguna untuk perencanaan tahun berikutnya.

Dan apabila pengawasan dan monitoring kita orientasikan sebagai suatu fungsi BAPPEDA, maka hal itu semata-mata kepentingan kelanjutan dari rencana yang telah ditetapkan dan menggunakan sistem komperatif, sebagai berikut :

1. Mempelajari laporan – laporan kemajuan dari pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan jadwal pelaksanaan rencana.

2. Membandingkan lapran-laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dengan rencana yang telah diputuskan sebelumnya.
3. Mengadakan analisis terhadap perbedaan tersebut termasuk faktor lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan program dan proyek.
4. Memberikan penilaian terhadap hasil-hasil pelaksanaan pekerjaan termasuk para penanggung jawabnya.
5. Mengambil keputusan atas usaha perbaikan dan penyempurnaan.

Ukuran-ukuran yang digunakan BAPPEDA Kabupaten Barru dalam memonitoring program/proyek pembangunan, ditentukan sesuai dengan ukuran yang ditetapkan dalam perencanaan penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, maupun inpres dengan menggunakan laporan-laporan yang tercantum dalam garis-garis besar sebagai berikut :

1. Inventarisasi potensi wilayah
2. Permasalahan-permasalahan yang timbul sekaligus cara pemecahannya
3. Proyek yang akan dibiayai oleh APBD Asli Kabupaten Barru
4. Proyek yang akan dibiayai oleh APBD oleh APBD propinsi
5. Proyek yang akan dibiayai oleh bantuan-bantuan pembangunan, seperti bantuan Presiden dan lain sebagainya.

Penyajian hasil laporan-laporan tersebut dapat dijadikan pula sebagai suatu kebijaksanaan dalam menentukan suatu keputusan, sehubungan dengan penentuan perencanaan pembangunan lewat kegiatan monitoring dan pengawasan.

Dalam melaksanakan monitoring dan pengawasan program/proyek mereka memperhatikan faktor keterbatasan tenaga, biaya, teknis serta masalah komunikasi hasil guna dari rencana program/proyek yang telah direncanakan untuk perencanaan tahun berikutnya, karena pelaksanaan pembangunan berada pada proses berkesinambungan dan keterpaduan pembagunan, sehingga pengawasan dan monitoring bukan untuk mengoreksi kesalahan atau mencari penyimpangan seperti pada pengawasan. Akan tetapi mempertahankan rencana dan untuk kepentingan perencanaan tahap berikutnya.

Dalam pelaksanaan fungsi monitoring dan pengawasan dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, maka pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Barru ini dinilai responden sebagai berikut :

Tabel 8. Tanggapan Responden Mengenai Fungsi Monitoring dan Pengawasan Rencana Pembangunan BAPPEDA Kabupaten Barru Tahun 2001

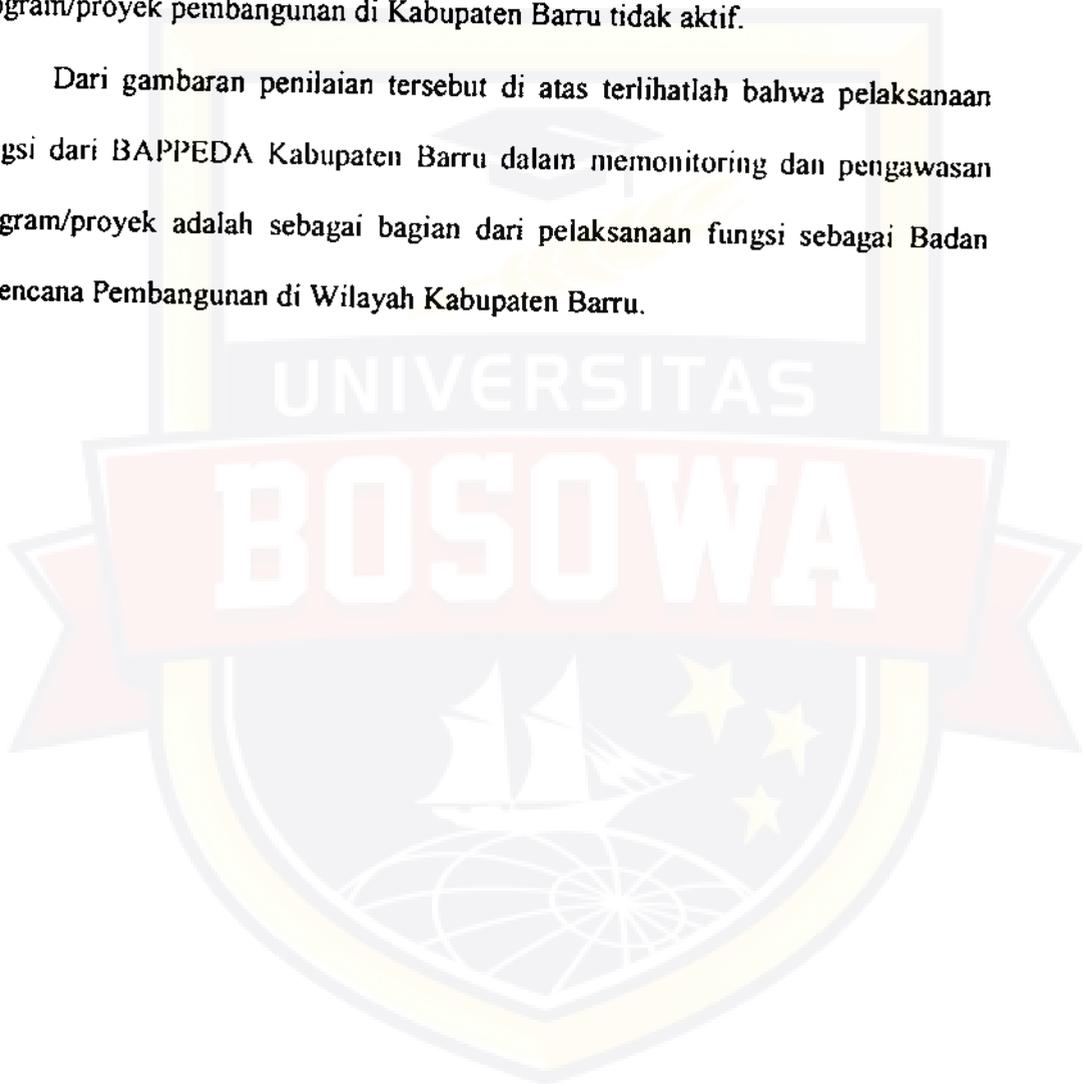
No.	Keterangan Responden	Frekwensi	Prosentase (%)
1.	Aktif	17	53,13
2.	Kurang aktif	9	28,14
3.	Tidak aktif	6	18,75
	Jumlah	32	100,00

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2003

Tabel tersebut di atas merupakan hasil penilaian responden mengenai pelaksanaan tugas BAPPEDA Kabupaten Barru, dalam memonitoring dan pengawasan rencana pembangunan guna kepentingan rencana yang telah ditetapkan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan berikutnya. Dari penilaian

ini dinilai 17 orang atau 53,13 % adalah pelaksanaannya aktif, 9 orang atau 28,14 % yang memberikan penilaian pelaksanaannya kurang aktif, 6 orang atau 18,75 % memberikan penilaian pelaksanaan monitoring dan pengawasan rencana program/proyek pembangunan di Kabupaten Barru tidak aktif.

Dari gambaran penilaian tersebut di atas terlihatlah bahwa pelaksanaan fungsi dari BAPPEDA Kabupaten Barru dalam memonitoring dan pengawasan program/proyek adalah sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi sebagai Badan Perencana Pembangunan di Wilayah Kabupaten Barru.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun pelaksanaan fungsi monitoring BAPPEDA Kabupaten Barru dalam rangka kepentingan perencanaan pembangunan dan berusaha melakukan kontak dengan pihak yang terkait guna mengetahui sebab sehingga terjadi penyimpangan yang selanjutnya diambil kebijaksanaan korektif untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Pada dasarnya BAPPEDA Kabupaten Barru tidak mempunyai fungsi melakukan pengawasan pembangunan, akan tetapi pengawasan yang dilakukan adalah bentuk monitoring pembangunan dan proyek yang telah direncanakan dan berguna untuk perencanaan tahun berikutnya.

Dan apabila pengawasan monitoring kita orientasikan sebagai suatu fungsi BAPPEDA, maka hal itu semata-mata kepentingan dari kelanjutan rencana yang telah ditetapkan dan menggunakan sistem komparatif, sebagai berikut :

- Mempelajari laporan-laporan kemajuan dari pelaksanaan pekerjaan.
- Mengadakan analisa terhadap perbedaan tersebut termasuk faktor lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan program dan proyek.
- Mengambil keputusan atas usaha perbaikan dan penyempurnaan.

Ukuran-ukuran yang digunakan BAPPEDA adalah memonitoring program atau proyek pembangunan, ditentukan sesuai dengan ukuran yang ditetapkan

dalam perencanaan penyusunan APBD, maupun INPRES dengan menggunakan laporan-laporan yang tercantum :

- Permasalahan-permasalahan yang timbul sekaligus cara pemecahannya proyek yang akan dibiayai oleh APBD Asli Kabupaten Barru atau Propinsi.
- Proyek yang akan dibiayai oleh bantuan pembangunan seperti bantuan Presiden dan lain-lain.

Dalam melaksanakan monitoring dan pengawasan program atau proyek, mereka memperhatikan faktor keterbatasan tenaga, biaya, teknis. Serta masalah komunikasi guna mengoptimalkan program atau proyek yang telah direncanakan dan dipelajari dimana keterbatasan serta kekurangan dari program atau proyek tersebut untuk disempurnakan pelaksanaannya pada tahun yang akan datang.

Dari kesimpulan penilaian tersebut di atas terlihatlah bahwa pelaksanaan fungsi dari BAPPEDA Kabupaten Barru dalam memonitoring program atau proyek adalah sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi badan perencanaan pembangunan Wilayah Kabupaten Barru.

B. Saran

- a. Dalam memperlancar pelaksanaan proyek-proyek pembangunan hendaknya semua unsur yang terlibat, mengerti dan menghayati serta merealisasikan usaha kerjasama guna mendukung pelaksanaan koordinasi dengan lancar, karena dengan koordinasi yang baik semua kegiatan yang dilakukan oleh instansi vertikal dan dinas-dinas daerah mudah dikendalikan dan diawasi.

- b. Untuk memperoleh hasil perencanaan pembangunan yang baik, maka diperlukan tenaga-tenaga perencana yang berkualitas dan punya pengalaman teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, oleh karena itu upaya untuk senantiasa mengadakan pendidikan dan latihan adalah merupakan salah satu upaya yang positif.
- c. Untuk lebih memperlihatkan fungsi BAPPEDA Kabupaten Barru dalam pembangunan, maka diharapkan lebih selektif atau memperketat setiap proyek yang diusulkan oleh berbagai instansi/dinas-dinas daerah setempat dengan melihat skala prioritas, hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan tidak semrawut.



DAFTAR PUSTAKA

- Alvin Y. SO Suwarsono, 1994, *perubahan Sosial dan pembangunan di Indonesia*, Jakarta, Pustaka LP3ES.
- Alwi Dahlan, Syafri Sairin, Effendi Sofian, 1996, *Membangun Martabat Manusia* Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Arikunto, Suharsimi, 1997, *Prosedur Penelitian*, Jakarta.
- Barthus, Basir, 1990, *Pengetahuan Anggaran Belanja Negara (Rutin dan Pembangunan)*, Jakarta, Bina Aksara.
- Conyers Diana, 1994, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Gramsci Antonio, 1999, *Kritik Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Jayadinata T. Johara, 1999, *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*, Bandung, Penebit ITB.
- Nawawi, Hadari, H, 1992, *Pengawasan melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta : Erlangga.
- Nasikun, 1987, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta : Rajawali.
- Rasyid Ryaas, Gaffar Afan, Syaukami, 2002, *Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset.
- Soekartawi, 1990, *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan (Dengan Pokok Bahasan Khusus Perencanaan Pembangunan Daerah)*, Jakarta : Rajawali.
- Syafrizal, 1985, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta : LP3ES.
- The Liang Gie, Bintaro, 1990, *Perencanaan Pembangunan* Jakarta : Haji Masagung.
- Tjakroaminoto Moeljarto, 1996, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Waldo Dwight, 1986, *Pengantar Studi Public Administration*, Jakarta : Aksara Baru.